

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Binov Handitya. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4, 2018, 360.
- Djoko Prakoso. *Tindak Pidana PEMILU*. Rajawali. Jakarta, 1987.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba hu. Jakarta, 2019.
- Heryonto, Gun Gun, and Ade Rina Farida. *Komunikasi Politik*. Lembaga pe. Jakarta, 2011.
- Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Universitas. Yogyakarta, 2009.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, Cet. VIII.
- Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & PEMILU Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana. Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara bar. Jakarta, 1987.
- Zulpikar. 'Kepercayaan Masyarakat terhadap pengawas PEMILU'. *greaan komunika.kota Tangerang Selatan banten*. 2020. h. 57

JURNAL DAN SKRIPSI

Chusnul Mar'iyah. "Partai Politik Dan Demokrasi." *jurnal ketatanegaraan* ,2018.

Selvi Yuliyanti,2016, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana PEMILU Legislatif Tahun 2014," *jurnal.fh.unila.ac.id* vol 10.

Khairul Fahmi,2015, "Sistem Penanganan Tindak Pidana PEMILU," *jurnal konstitusi* vol 12 .

Ojsadmin,2019 "Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana PEMILU 2019," *jurnal.kpu.go.id*

Made Sumertana Dkk,2021, "Peran Sentra Penegak Hukum Terpadu(Gak Kumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Huku Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bulelng)," *jurnal kerth widyaha* vol 9: 32.

Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.

Ratnia Sholihah, dkk (ed),2018, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No.1, h.15.

Lusy Liany,2018, "Kedudukan dan Kewenangan BAWASLU dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia", dalam *Lex Jurnalica*, Vol.15, No. 3). hal 308.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Pasal

(Pasal 469 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

(Pasal 647 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.)

(Pasal 98 Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 91

Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

REFERENSI LAIN-LAIN

Sarmin, “Memahami pelanggaran administrasi PEMILU sesuai peraturan BAWASLU nomor 8 tahun 2018” <http://baubau.BAWASLU.go.id> di akses pada senin, 01 mei 2024

Anita S. Tampi “Problematika Penangan Pelanggaran Kode Badan Ad Hoc Di Daerah Kepulauan”, Artikel Hukum <http://jdih.kpu.go.id/sulut> , diakses 17 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, <http://www.kpu-baubaukota.go.id/PEMILU-1977-1982-1987-1992-dan-1997.html>, diakses 17 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan suara pada Pilpres 2019, <https://www.Kominfo.go.id/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/> berita, diakses pada 27 Maret 2024, pukul 11.02 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Umum>, diakses pada 27 Maret 2024, pukul 15.43 WIB.

Standar-standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum PEMILU, dea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-PEMILU.pdf, diakses 27 Maret 2024, Pukul 18.56 WIB.

Jenis-jenis Tindak Pidana PEMILU, <https://dntlawyers.com/12-jenis-tindak-pidana-PEMILU-yang-harus-anda-ketahui/>, diakses pada 27 maret 2024, Pukul 09.15 WIB.

<https://doi.org/10.38043/Jah.V5i1.3223>